

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan/atau Sumber Lainnya

- Adji, Indriyanto Seno. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ali, M. (2018). Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 137-158.
- Arfana, N. T. (15 Desember 2021). Penghentian Penyelidikan Bukan Objek Pengujian Praperadilan. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17862>
- Arifki, N. A. (2019). Penyelesaian Kerugian pada Pendapatan Negara melalui Pengungkapan Ketidakbenaran (Suatu Kajian Hukum Doktrinal dalam Sistem Perpajakan). *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 91-104.
- Aziezi, M. T. (2020). Peran Penting Konsistensi Putusan Mahkamah Agung Terkait Pelaksanaan Pidana Denda Pajak dalam Mengoptimalkan Pengembalian Penerimaan Negara dari Tindak Pidana Pajak. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(1), 39-63.
- Batuwael, R. A. (2020). Fungsi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, 9(3).
- Chazawi, Adami. (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing.
- Effendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama.

- Effendi, P. (2016). Netralisasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Aparatur Negara Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 5(2).
- Effendy, Marwan. (2010) *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*. PT Timpani Publishing.
- Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z. (2021). Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia. *Sign Journal Of Law (Sign Jurnal Hukum)*, 3(1), 1-25.
- Gunadi. (2016). *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Edisi Revisi*. Bee Media Indonesia.
- Hamzah, Andi. (1986) *Hukum Pidana Ekonomi*. Erlangga.
- Hamzah, A. (1991). *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta.
- Harahap, A. J. H. (2018). Tinjauan Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagai Ultimum Remedium Dalam Hukum Pajak di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara 1. *Karya Tulis Tugas Akhir*.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Sinar Grafika.
- Hasibuan, S., Ablisar, M., Marlina, M., & Barus, U. M. (2015). Asas Ultimum Remedium Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak. *USU Law Journal*, 3(2), 115-125.

- Ilyas, W. B. (2011). Kontradiktif Sanksi Pidana dalam Hukum Pajak. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), 525-542.
- Ilyas, W. B., & Burton R. (2013). *Hukum Pajak; Teori, Analisis dan Perkembangannya*. Salemba Empat.
- Ilyas, W. B., & Burton R. (25 Oktober 2021). Uji Kemanfaatan Pidana Pajak Pasca-UU HPP. *Investor Daily*.
- Irawan, Hadi. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Bayu Media.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lamond, G. (2007). What is a Crime?. *Oxford Journal of Legal Studies*, 27(4), 609-632.
- Mangoli, A. Y. (2016). Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Menurut KUHAP. *Lex Crimen*, 5(3).
- Moeljatno,. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muttaqin, Zainal, dkk. (2015). Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan Melalui Mekanisme Diluar Pengadilan (Suatu Alternatif), *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(2).
- Priyono, A. P., & Intarti, A. (2019). Penegakkan Hukum Sanksi Pidana Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dikaitkan dengan Asas Ultimum Remedium. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 1-14.

- Rahmat, R. B. (19 Juni 2021). *Ditjen Pajak Kalah Praperadilan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan*. <https://rri.co.id/jakarta/1672-polhukam/1084863/ditjen-pajak-kalah-praperadilan-dalam-pemeriksaan-bukti-permulaan>
- Ritonga, A. (2007). *Pembaharuan Perpajakan dan Hukum Fiskal Formal Indonesia*. Yayasan Bina Baca Aksara, Jakarta.
- Saidi, M. D. (2007). *Perlindungan hukum wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak*. Grafindo Persada.
- Saputra, Dany. (6 Desember 2021). *Azas Ultimum Remedium pada UU HPP Dinilai Lebih Objektif bagi Wajib Pajak*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211206/259/1474000/azas-ultimum-remedium-pada-uu-hpp-dinilai-lebih-objektif-bagi-wajib-pajak>.
- Setiadi, S. (2022). Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid 2. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 7(1).
- Sianturi, S. R. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*. Alumni AHAEM PTHAEM.
- Sirait, T. M. (2019). *Hukum Pidana Pajak Indonesia (Materiil dan Formil)*. CV. Budi Utama.
- Supardi, Eddy Mulyadi. (2009). *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama.
- SulTony, A. (2021). Urgensi Regulasi Eksekusi Pidana Denda di Bidang Perpajakan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Wajah Hukum*, 5(1), 212-222. <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.391>

- Soedarto. (1975). Hukum Pidana Jilid I A-B. *Diponegoro Lawa Journal*. 7.
- Soemitro, H. R. (1988). *Pajak ditinjau dari segi hukum*. Eresco.
- Sofian, A., & Hasibuan, B. M. (2021). Pengaturan dan Praktek Praperadilan Tindak Pidana Pajak Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 701-718.
- Solihin, N. (2018). *Harmonisasi Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia dengan KUH-Pidana Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perpajakan Indonesia* (Doctoral dissertation, Perpustakaan Pascasarjana).
- SUSANTI, R. (2011). Peradilan In Absentia Dalam Upaya Pengembalian. *Tesis*.
- Syofyan, S., & Hidayat, A. (2004). *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Refika Aditama.
- Waluyo, T. (2018). Pemeriksaan atau Pemeriksaan Bukti permulaan dalam rangka Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 458-476.
- Yassin, M. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil. *Yuridika*, 31(2), 254-272.
- Zuraida, Ida. (2015). *Bahan Ajar DTSS IDLP Dasar*, Pusdiklat Pajak.

2. Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (1946). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Republik Indonesia. (1981). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.03/2009.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.